



Guru di Sumba Barat membacakan cerita kepada siswanya untuk menumbuhkan minat baca sejak dini. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Kabupaten Sumba Barat

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Sumba Barat: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Sumba Barat belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas pembelajaran

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Sumba Barat meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan (khususnya berbasis gender) di sekolah, norma budaya yang membatasi peran perempuan, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta terbatasnya langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sistematis.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif dan efektif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil, serta (4) memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

- **Literasi** : Laki-laki 36,31; perempuan 38,79
- **Numerasi** : Laki-laki 28,89; perempuan 29,38

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar 4-6 poin dari nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Sumba Barat, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Sumba Barat pada Desember 2024. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Sebanyak 3-5 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Mayoritas kasus kekerasan berupa kekerasan seksual, yang mengakibatkan trauma mendalam pada korban. Hal ini disebabkan pemangku kepentingan belum sepenuhnya memahami definisi dan cakupan kekerasan, sehingga perundungan dan kekerasan antarmurid dibiarkan.

Selain itu, aturan dan tradisi adat memperkuat norma dan stereotip gender tradisional. Hal ini membatasi peran dan tanggung jawab perempuan dalam pendidikan dan pemilihan karir, pengambilan keputusan di komunitasnya, serta penerimaan warisan keluarga.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 682 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 21% tidak sekolah dan 79% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusif (8%), sekolah inklusi (54%), atau sekolah luar biasa/ SLB (17%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun masih sangat kuat di masyarakat, sehingga mereka tidak didaftarkan ke sekolah atau disembunyikan di rumah, juga rentan mengalami perundungan dan kekerasan.

Di sisi lain, masih banyak pula murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid dengan latar belakang keluarga yang kompleks (orang tua tidak menikah, orang tua berpisah, atau tidak punya orang tua), murid di daerah terpencil, murid dalam perkawinan anak, dan murid belum bisa berbahasa Indonesia.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Sumba Barat mencapai 159,63 dari 250. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Nusa Tenggara Timur (132,81) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, kabupaten ini berisiko sedang mengalami banjir, gempa bumi, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, serta cuaca ekstrem.

Sekolah dan masyarakat telah melakukan langkah mitigasi dan adaptasi secara mandiri. Misalnya, menanam pohon, mengubah sampah jadi pupuk kompos, dan memberi sanksi jika membuang sampah sembarangan. Namun, masih ada perilaku dan kebiasaan yang merusak lingkungan, seperti membakar hutan untuk pembukaan lahan. Pemerintah pun belum menerapkan regulasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara konsisten.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sumber utama terjadinya perkawinan anak, kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi, serta murid putus sekolah.



Gangguan belajar akibat upacara adat

Upacara dan tradisi adat, yang perlu waktu banyak dan biaya besar, menyebabkan murid dan guru sering tidak hadir di sekolah serta orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak. Selain itu, belum ada kegiatan alternatif bagi murid yang absen dari sekolah.



Gangguan belajar akibat perubahan iklim

Dampak perubahan iklim memengaruhi angka kehadiran murid di sekolah (absen karena sakit atau bekerja di sawah) dan konsentrasi mereka dalam proses pembelajaran.



Kekerasan dan disabilitas

Anak penyandang disabilitas rentan mengalami perundungan, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual, baik di lingkungan sekolah maupun rumah.



Latar belakang keluarga kompleks

Anak dari keluarga berlatar belakang kompleks (orang tua terlibat perkawinan anak dan perkawinan sedarah atau orang tua tunggal) rentan memiliki disabilitas; menjadi korban stigma sosial, perundungan, dan kekerasan; serta ditelantarkan keluarga dan komunitas.



Aktivitas belajar siswa untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Siswa belajar tentang tanggung jawab dan kerja sama dalam menyiapkan perubahan iklim. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan agar semakin responsif dan efektif

1. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas akan bekerja sama dengan TPPK untuk mengadvokasi program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, seperti pendidikan karakter dalam kurikulum, penerapan tindakan disiplin positif yang relevan dengan perilaku murid, serta aturan dan SOP tertulis untuk kasus kekerasan.
2. Memperluas jangkauan program pencegahan kekerasan yang sudah berjalan (seperti Desa Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak/SRA, dan Forum Anak Desa), sehingga dapat memutus rantai kekerasan terhadap anak dan membuat mereka tumbuh di lingkungan yang aman.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pendidikan inklusif. Langkah ini bertujuan menjamin pemenuhan hak pendidikan serta penyediaan akses dan fasilitas belajar yang layak bagi murid penyandang disabilitas.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard Profil Belajar Siswa (PBS)*, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Memperkuat kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid penyandang disabilitas.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar) secara langsung ke masyarakat, terutama murid dari keluarga miskin dan di daerah terpencil. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.
3. Mengawasi dan memastikan pemberian bantuan tepat sasaran dan digunakan untuk pemenuhan hak pendidikan murid.
4. Bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P5A) untuk mengoptimalkan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan pemenuhan hak anak.



Dinas Lingkungan Hidup: Memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif dan inklusif

1. Mengupayakan penerapan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara konsisten. Peraturan tersebut meliputi pemberian sanksi atas kegiatan yang merugikan alam serta perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan, tahan bencana, dan berkelanjutan.
2. Melakukan sosialisasi dan memperluas penerapan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan. Dengan begitu, kebijakan dan program tersebut bisa dipahami masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku mereka.
3. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan, respons bencana, dan adaptasi komunitas terhadap perubahan iklim.